

# LAB 45 — TELAAH KEBIJAKAN

No. 0034 - 5 Januari 2026

Telaah Kebijakan LAB 45 adalah wadah yang dirancang untuk menyampaikan pandangan kritis dan analisis terkini dari para peneliti serta analisis kebijakan terkait berbagai isu strategis seputar politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Platform ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam sekaligus menawarkan gagasan inovatif dalam menghadapi tantangan lokal ataupun global. Pendapat yang tercantum dalam setiap komentar merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak merefleksikan posisi resmi LAB 45. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami melalui [lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id).



## Intelijen Boleh Senyap, Tapi Jangan Tidur

### Catatan Akhir Tahun Kinerja Badan Intelijen Negara

#### Pendahuluan: Paradoks Keamanan dalam Transisi Kekuasaan

Judul tulisan ini adalah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Hor (purn) Muhammad Herindra dalam rapat koordinasi pemerintah daerah seluruh Indonesia pada 7 November 2024, kira-kira satu bulan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik. Ucapan “*Rajawali*” kode untuk menyebut Herindra itu cukup viral di media sosial. Setelah banyak potongan video pendek yang beredar melalui media sosial paling populer di Indonesia, Tiktok. Tulisan pendek ini berupaya menelaah kinerja BIN dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Pergantian kepemimpinan nasional memang selalu memicu penataan ulang arsitektur keamanan negara. Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor intelijen di simpul vital. Posisi ini menentukan keseimbangan antara stabilitas politik, keamanan nasional, dan legitimasi demokrasi. Hal ini bukan semata karena perubahan figur pemimpin. Ini terjadi karena adanya perubahan fundamental dalam *policy temperament* negara.

Latar belakang Presiden Prabowo Subianto di ranah pertahanan sangat kuat. Kondisi ini mendorong negara mengandalkan instrumen strategis. Instrumen ini bekerja cepat, tertutup, dan berbasis informasi akurat. Dalam konfigurasi baru ini, BIN berada di posisi paradoksal. Di satu sisi, BIN diharapkan menjadi “mata dan telinga” negara. Ia bertugas membaca ancaman sebelum menjadi krisis nyata. Di sisi lain, BIN harus tetap berada dalam rel hukum. Ia wajib mematuhi etika demokrasi. BIN tidak boleh berubah menjadi perangkat kontrol yang menekan ruang sipil.

Evaluasi kinerja BIN tidak dapat dilakukan dengan ukuran administratif yang dangkal. Sekadar menyebut “tidak ada gejolak” bukanlah indikator yang memadai. Evaluasi harus diletakkan dalam kerangka *intelligence governance*. Kerangka ini menimbang kualitas fungsi peringatan dini. Ia juga mengukur ketepatan analisis strategis. Selain itu, kepatuhan kepada mekanisme akuntabilitas yang sah menjadi syarat mutlak.



**Ridwan Habib**

Alumni Program Magister Kajian Strategi Intelijen Universitas Indonesia. Direktur The Indonesia Intelligence Institute, lembaga studi strategis yang mengkaji berbagai pola ancaman dalam dan luar negeri Indonesia.

Pertanyaan utama dalam evaluasi ini sangat spesifik. Bukan hanya “seberapa aman negara ini”. Pertanyaan yang lebih kritis adalah “dengan cara apa keamanan itu dikelola”. Kita juga harus bertanya seberapa sehat relasi antara keamanan dan demokrasi dipertahankan. Tulisan ini membedah kinerja BIN sebagai aktor strategis. Analisis dilakukan dalam tiga lapisan sekaligus. Lapisan politik menyoroti kedekatan dengan pusat keputusan. Lapisan operasional menilai pengelolaan informasi dan analisis. Lapisan normatif menguji kepatuhan kepada etika dan kontrol demokratis.

## Menuju Intelijen Demokratis yang Akuntabel

Intelijen dalam negara demokratis memiliki posisi unik. Ia tidak dapat diposisikan semata sebagai alat kekuasaan tertutup. Fungsinya bukan hanya menjaga stabilitas politik rezim. Intelijen adalah bagian dari tata kelola negara yang sah. Mandat utamanya adalah menyediakan pengetahuan strategis bagi pengambil keputusan. Negara harus mampu mengantisipasi ancaman dan mengelola risiko.

Intelijen modern bekerja dalam ketegangan permanen. Tegangan terjadi antara kebutuhan kerahasiaan dan tuntutan akuntabilitas. Kerahasiaan adalah prasyarat efektivitas operasi. Intelijen tidak dapat beroperasi jika seluruh metodenya transparan. Namun, kerahasiaan tanpa kendali membuka peluang penyimpangan. Risiko bias analitis yang mengikuti kehendak politik bisa muncul. Perluasan mandat tanpa dasar hukum juga menjadi ancaman nyata.

Konsep *intelligence governance* menjadi solusi institusional. Konsep ini merujuk kepada pengelolaan intelijen secara terstruktur. Hal ini mencakup kejelasan mandat dan pembagian kewenangan. Mekanisme koordinasi dan pelaporan analisis juga diatur ketat. Tata kelola yang sehat mencegah konsentrasi kekuasaan. Intelijen tidak boleh bekerja sebagai entitas otonom tanpa kontrol. Pengawasan demokratis (*democratic oversight*) menjadi elemen krusial. Pengawasan berfungsi memastikan intelijen bekerja sesuai hukum. Prinsip proporsionalitas dan penghormatan hak sipil harus dijaga. Pengawasan bukan dimaksudkan untuk membuka rahasia negara. Tujuannya adalah menjaga legitimasi institusi intelijen. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan. Pengawasan terlalu longgar membuka ruang penyimpangan. Sebaliknya, pengawasan terlalu ketat menghambat fleksibilitas operasional.

Kita harus membedakan *strategic intelligence* dan *political intelligence*. *Strategic intelligence* berorientasi kepada kepentingan negara jangka panjang. Fokusnya adalah pemetaan ancaman struktural dan geopolitik. Sebaliknya, *political intelligence* berkaitan dengan kekuasaan jangka pendek. Jenis ini rawan disalahgunakan jika tidak dikendalikan. BIN harus memprioritaskan *strategic intelligence*. Jarak profesional dari politik praktis harus dijaga ketat.

## Antara Kontinuitas dan Konsolidasi

Kepemimpinan Kepala BIN menjadi variabel kunci analisis. Penunjukan figur berlatar belakang militer memberikan sinyal kuat. Intelijen ditempatkan sebagai instrumen strategis negara. Fungsi ini melampaui sekadar dukungan administratif kebijakan. Latar belakang pimpinan memengaruhi gaya kerja institusi. Ada penekanan kepada disiplin hierarkis dan kecepatan respons. Kepatuhan struktural menjadi nilai utama organisasi.

Pada tahun pertama era Prabowo, terjadi konsolidasi internal. Kepemimpinan BIN fokus kepada stabilisasi organisasi. Loyalitas institusional ditekankan di tengah transisi politik. Pertanyaan kritis muncul terkait independensi analitis. Intelijen harus cukup dekat dengan pusat kekuasaan. Hal ini agar analisisnya relevan dan digunakan oleh

Presiden. Namun, kedekatan ini berisiko. Intelijen tidak boleh larut dalam preferensi politik penguasa. Daya kritis analisis harus tetap terjaga. Hingga saat ini, tidak terlihat indikasi penyimpangan terbuka. BIN tidak diarahkan menjadi instrumen politik praktis secara eksplisit. Alat represi terhadap oposisi belum terlihat digunakan. Namun, ketiadaan indikasi bukan jawaban final. Risiko politisasi sering bersifat laten pada awal pemerintahan. Risiko ini sering kali tidak kasat mata. Kepemimpinan BIN perlu dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara kedekatan strategis dan jarak profesional sangat vital.

Arah kelembagaan menunjukkan pola kontinuitas kebijakan. Tidak terjadi reorientasi radikal dalam tubuh BIN. Fungsi utama peringatan dini tetap dipertahankan. Dukungan kebijakan strategis berjalan seperti biasa. Namun, kontinuitas ini bukan berarti stagnasi. Ada penekanan kuat kepada penguatan kapasitas internal. Sumber daya manusia dan kesejahteraan aparatur menjadi prioritas. Peningkatan tunjangan kinerja mencerminkan kesadaran pimpinan. Tantangan intelijen kontemporer menuntut analisis kompleks. Ancaman disinformasi dan siber membutuhkan analisis berkualitas tinggi.

Stabilitas nasional menjadi indikator kinerja paling terlihat. Tahun pertama pemerintahan relatif terjaga dari eskalasi krisis. Konflik horizontal berskala luas tidak terjadi. Serangan teror berdampak sistemik sangat minim. Dalam studi intelijen, ini tanda keberhasilan fungsi preventif. Mekanisme peringatan dini berjalan cukup efektif. Namun, evaluasi akademik harus lebih dalam. Stabilitas nasional tidak boleh diterima begitu saja. Kita harus bertanya bagaimana stabilitas itu dicapai. Apakah melalui profesionalisme intelijen yang taat hukum? Atau melalui perluasan kekuasaan tak terkendali? Di sinilah kepemimpinan Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra diuji. Ia bukan hanya manajer keamanan. Ia adalah penjaga etika institusi dalam demokrasi.

Tantangan etika pertama adalah transparansi versus kerahasiaan. Di bawah Presiden Prabowo, orientasi keamanan sangat kuat. Ekspektasi terhadap efektivitas intelijen meningkat tajam. Peningkatan ini berpotensi memperluas ruang kerja tertutup. Profil rendah (*low profile*) BIN tahun ini bisa dibaca positif. BIN berhasil menghindari kontroversi publik besar. Namun, profil rendah bukan berarti meniadakan transparansi. Akuntabilitas anggaran dan batas mandat tetap perlu diawasi. Isu kebebasan sipil pada era digital menjadi sorotan. Ruang sipil kini berada di ekosistem informasi daring. Pemerintah menghadapi tantangan polarisasi dan disinformasi. Intelijen berperan penting dalam pemetaan risiko ini. Namun, garis batasnya sangat tipis. Pemetaan ancaman bisa bergeser menjadi pengawasan warga. Tantangan demokratis bagi BIN sangat nyata. Kegiatan intelijen harus memegang prinsip proporsionalitas.

Dimensi hukum juga menjadi aspek krusial. Secara formal, BIN bekerja sesuai undang-undang. Namun, hukum intelijen sering bersifat umum. Ruang interpretasi hukum masih sangat luas. Kepala BIN dituntut memiliki sensitivitas hukum. Ia harus menerjemahkan mandat tanpa melanggar hak sipil. Risiko perluasan interpretasi hukum selalu ada demi stabilitas. Kepemimpinan Herindra diuji dalam disiplin hukum internal. Efektivitas tidak boleh mengorbankan kepastian hukum. Tantangan koordinasi lintas lembaga tidak kalah kompleks. BIN bekerja dalam ekosistem bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada era Prabowo, koordinasi cenderung terpusat dan hierarkis. Sisi positifnya adalah kecepatan pengambilan keputusan. Sisi negatifnya adalah risiko dominasi pendekatan keamanan keras. BIN harus memastikan koordinasi yang setara. Hubungan antarlembaga tidak boleh menjadi subordinasi satu arah.

## Paradoks *Preventive Intelligence*

Analisis dampak intelijen menghadapi kendala metodologis. Keberhasilan intelijen sering kali bersifat “tidak terlihat”. Kegagalan intelijen justru yang sering terekspos. Konsep *preventive intelligence* menjadi kunci pemahaman. Fokusnya bukan penanganan krisis yang sudah terjadi. Fokus utamanya adalah identifikasi risiko sejak dini. Fungsi ini memungkinkan negara menjaga keamanan secara elegan. Langkah represif yang masif dapat dihindari.

Indikasi keberhasilan terlihat dari data lapangan. Potensi konflik horizontal relatif terkendali. Ancaman teror tidak meningkat secara signifikan. Absennya eskalasi adalah bukti kuat keberhasilan pencegahan. Namun, indikator stabilitas memiliki kelemahan serius. Stabilitas dipengaruhi banyak faktor di luar intelijen. Ekonomi dan kepemimpinan politik turut andil. Bahaya laten adalah munculnya stabilitas semu. Stabilitas ini dicapai melalui pembungkaman kritik. Pengawasan berlebihan terhadap warga juga bisa menciptakan rasa aman palsu. Evaluasi kinerja BIN tidak boleh berhenti di klaim aman. Perlu dipastikan tidak ada *trade-off* tersembunyi. Keamanan tidak boleh menukar kebebasan sipil secara berlebihan.

Penilaian kinerja harus bersifat multidimensional. Indikator tidak langsung menjadi sangat penting. Konsistensi kebijakan dan ketiadaan skandal legal adalah ukuran valid. Sepanjang tahun pertama, tidak ada skandal besar terungkap. Namun, ketiadaan skandal bukan bukti final. Ini justru kesempatan memperkuat pengawasan. Tujuannya agar masalah tidak meledak pada kemudian hari. Konteks global memberikan perspektif perbandingan. Negara demokrasi seperti AS dan Inggris menghadapi dilema serupa. Penguatan kapasitas intelijen mereka diikuti pengawasan ketat. *Oversight* dilakukan parlemen dan badan independen. Profesionalisme intelijen membutuhkan demokrasi sebagai sumber legitimasi. Indonesia menghadapi tantangan unik dan berbeda.

Ancaman di Indonesia bersifat hibrida dan berlapis. Terorisme, konflik identitas, dan disinformasi bercampur aduk. Pendekatan terlalu represif akan mendelegitimasi negara. Pendekatan terlalu permisif akan melemahkan pencegahan. Indonesia harus menavigasi ruang tengah yang kompleks ini. Jika tata kelola transparan diterapkan selektif, Indonesia bisa jadi model. Indonesia berpotensi menjadi contoh intelijen demokratis di kawasan. Sebaliknya, jika stabilitas jadi tameng, kualitas demokrasi akan merosot.

## BIN Yang Dipercaya Publik

Tulisan pendek ini tentu sulit menghasilkan rekomendasi berjenjang. Namun setidaknya, perbaikan tata kelola BIN bisa dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Tantangan jangka pendek adalah konsistensi profesionalisme. BIN harus menjaga praktik operasional yang ketat. Prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) wajib dipatuhi. Standar internal batas kerja intelijen harus diperjelas. Fokus utama adalah pemantauan ruang digital yang sensitif. BIN perlu memosisikan diri sebagai penyeimbang. Ia tidak boleh sekadar menjadi penguat naluri keamanan politik. Analisis yang jujur harus terus disampaikan kepada Presiden.

Perhatian jangka menengah diarahkan kepada tata kelola. Penguatan mekanisme *oversight* harus menjadi prioritas. Pengawasan tidak boleh sebatas formalitas kelembagaan. BIN harus memandang pengawasan sebagai pelindung institusi. Transparansi terbatas justru meningkatkan kepercayaan publik. Kritik terhadap pengawasan yang pasif harus dijawab. BIN perlu membuka ruang evaluasi internal secara terkontrol.

Reformasi jangka panjang menyoar kultur intelijen. Tujuannya adalah membangun kultur intelijen demokratis yang matang. Ini bukan sekadar soal regulasi baru. Transformasi orientasi lembaga sangat mendesak. Pergeseran harus terjadi dari pengamanan rezim ke perlindungan negara. Investasi sumber daya manusia dan etika profesi harus terus berjalan. Budaya kritik internal dan independensi analisis mutlak diperkuat. Tantangan terbesar BIN pada era Prabowo sangat jelas. Tugasnya bukan sekadar menjaga negara tetap aman. Tugas utamanya memastikan keamanan tidak menggerus demokrasi. Kepercayaan publik adalah aset keamanan yang paling berharga. Reformasi jangka panjang ini akan menjadi penentu sejarah. Apakah BIN dikenang sebagai institusi efektif semata? Atau sebagai intelijen negara yang kuat, dewasa, dan *legitimate*?

---

*Jalan Mabes Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890*

*Email: [lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id) | Telp: +62811452045*

*Silahkan hubungi tim editorial untuk pertanyaan melalui  
[lab45@lab45.id](mailto:lab45@lab45.id)*